



DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

**Bahan Sahli PN Kemenkeu
pada Forum Nasional Stunting BKKBN**

Selasa, 14 Desember 2021



POKOK PEMBAHASAN

Kondisi Stunting di Indonesia

Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting

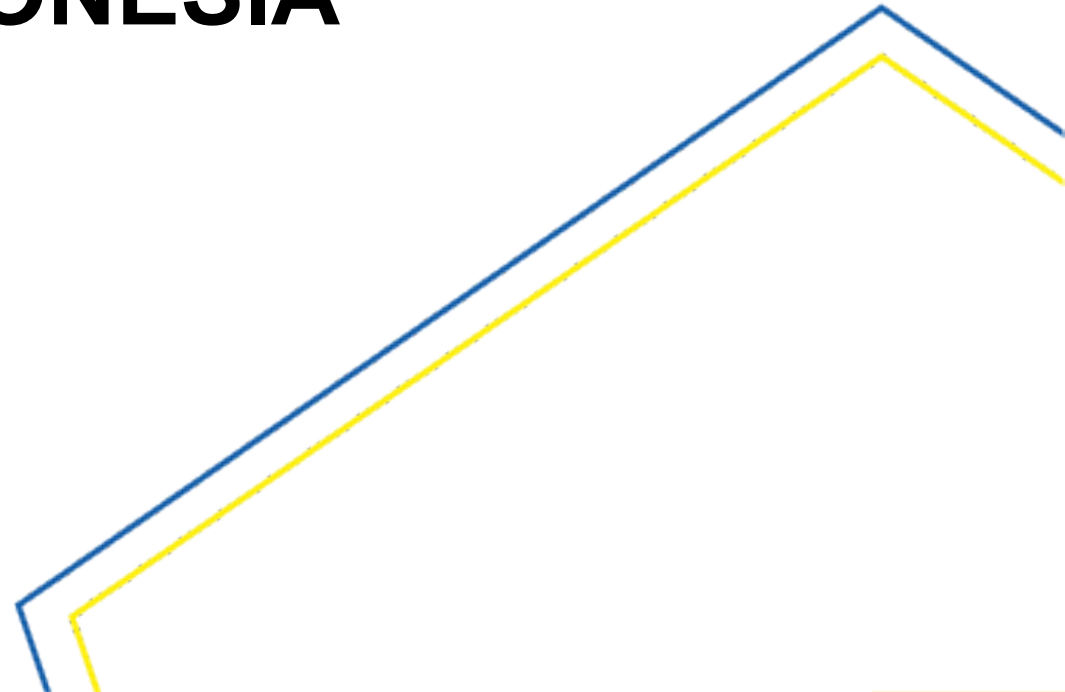
Dukungan APBN dalam Percepatan Penurunan Stunting

Peran Seluruh Pihak dalam Mengatasi Stunting



1

KONDISI STUNTING DI INDONESIA





Tingkat Prevalensi Stunting saat ini (27,7%) dan Target 2024 (14%)

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan upaya yang lebih agresif



Sumber: Riskesdas 2013, 2018; SSGBI 2019 (Capaian); RPJMN (Target)

Dalam 8 tahun terakhir, **stunting** terus menurun secara konsisten

- Rata-rata penurunan: 1,3% per tahun
- 2018-2019 penurunan signifikan: 3,1%
- Untuk mencapai target RPJMN diperlukan **penurunan: 2,7% per tahun** Kamboja

Di kawasan Asia Tenggara

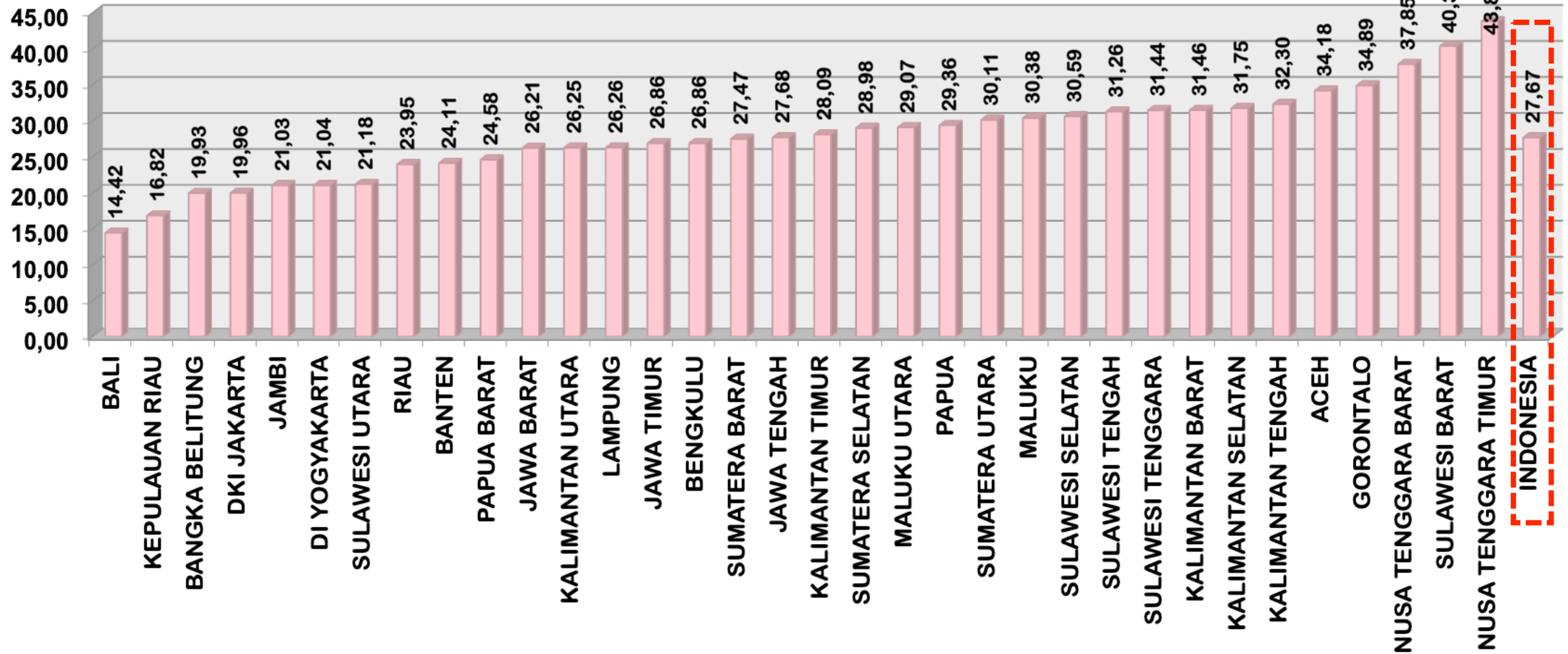
No	Negara	Prevalensi Stunting
1	Kamboja	29,2
2	Indonesia	27,7
3	Vietnam	24,6
4	Malaysia	20,7
5	Brunei	19,7
6	Thailand	10,5
7	Singapore	4,4

Upaya Percepatan Penurunan Stunting

- RPJMN 2020-2024:
 - Sebagai Proyek Prioritas
 - Sebagai *Major Project*
- Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting



Prevalensi Stunting Menurut Provinsi, SSGBI 2019



Sedang (4)

Tinggi (17)

Sangat Tinggi (13)



Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stunting

Terdapat kegiatan terkait penurunan stunting yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19

Dampak Pandemi terhadap *Stunting*

1. Pelayanan terhambat

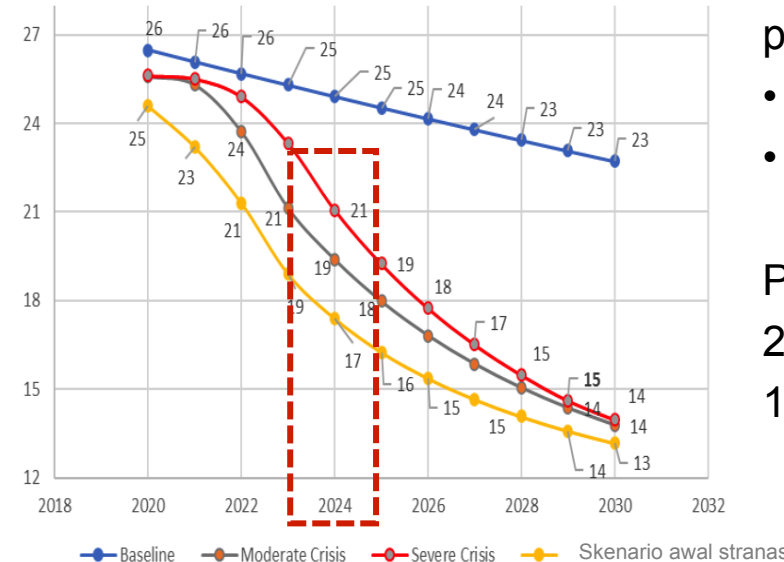
- Beban tenaga kesehatan meningkat, terhentinya kegiatan posyandu, Penduduk tidak datang ke posyandu

2. Daya beli menurun karena hilangnya pendapatan/ pekerjaan, khususnya pada rumah tangga miskin dan rentan, untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi di tengah pandemi

4. Anak-anak korban COVID-19 yang kehilangan orang tua (yatim dan/atau piatu) berpotensi mengalami penurunan kualitas hidup dan mengalami stunting

Tantangan

National projections of stunting for Indonesia before and after COVID-19 Crisis relative to pre-crisis NatStrat Optimistic



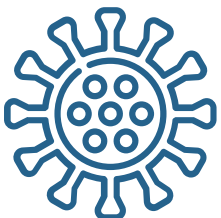
Sumber: Modifikasi dari *Impact of COVID-19 on Stunting in Indonesia* (World Bank, 2020)

Pandemi memperlambat penurunan *stunting*

- $\pm 2\%$ (2020)
- $\pm 3\%$ (2021)

Perkiraan capaian tahun 2024 19-21% (target 2024: 14%)

Inovasi dan Mitigasi



- Memastikan **pelayanan kesehatan** dan posyandu dapat **berjalan**
- Penajaman penyaluran **bantuan sosial** (MP ASI, fokus pada keluarga 1000 HPK)
- **RPerpres** diharapkan mampu **mengintegrasikan dan memberikan penajaman** pada **intervensi** yang dilakukan, termasuk dalam penajaman **sasaran prioritas**



2

KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



Menurut

**WORLD
HEALTH
ORGANIZATION**

Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang.

1. Dampak Jangka Pendek

- a. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian;
- b. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal;
- c. Peningkatan biaya kesehatan.

2. Dampak Jangka Panjang

- a. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya);
- b. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya;
- c. Menurunnya kesehatan reproduksi;
- d. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah; dan
- e. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

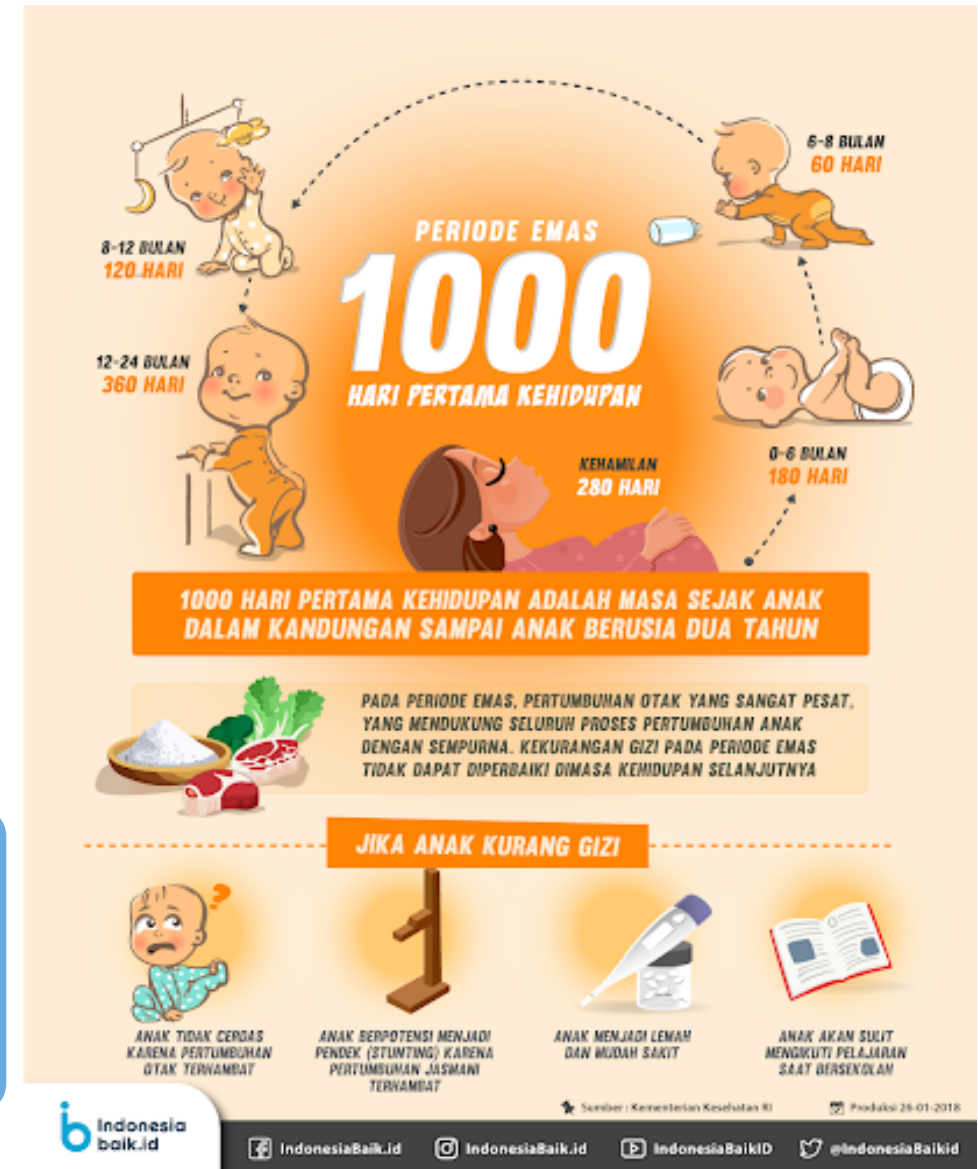


Pentingnya Pencegahan Stunting pada Masa 1.000 HPK

1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan periode yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun, dimana perkembangan massa otak 70-80% terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Fokus utama sasaran pencegahan stunting adalah pada masa 1.000 HPK, yaitu upaya pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan dengan pelayanan pranatal dan gizi ibu, kemudian dilanjutkan hingga bayi lahir dan anak tumbuh berusia dua tahun.

Pencegahan stunting pada 1.000 HPK sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa calon anak dapat lahir dan tumbuh dengan sehat dan status gizi yang baik, sehingga dapat terhindarkan dari stunting.





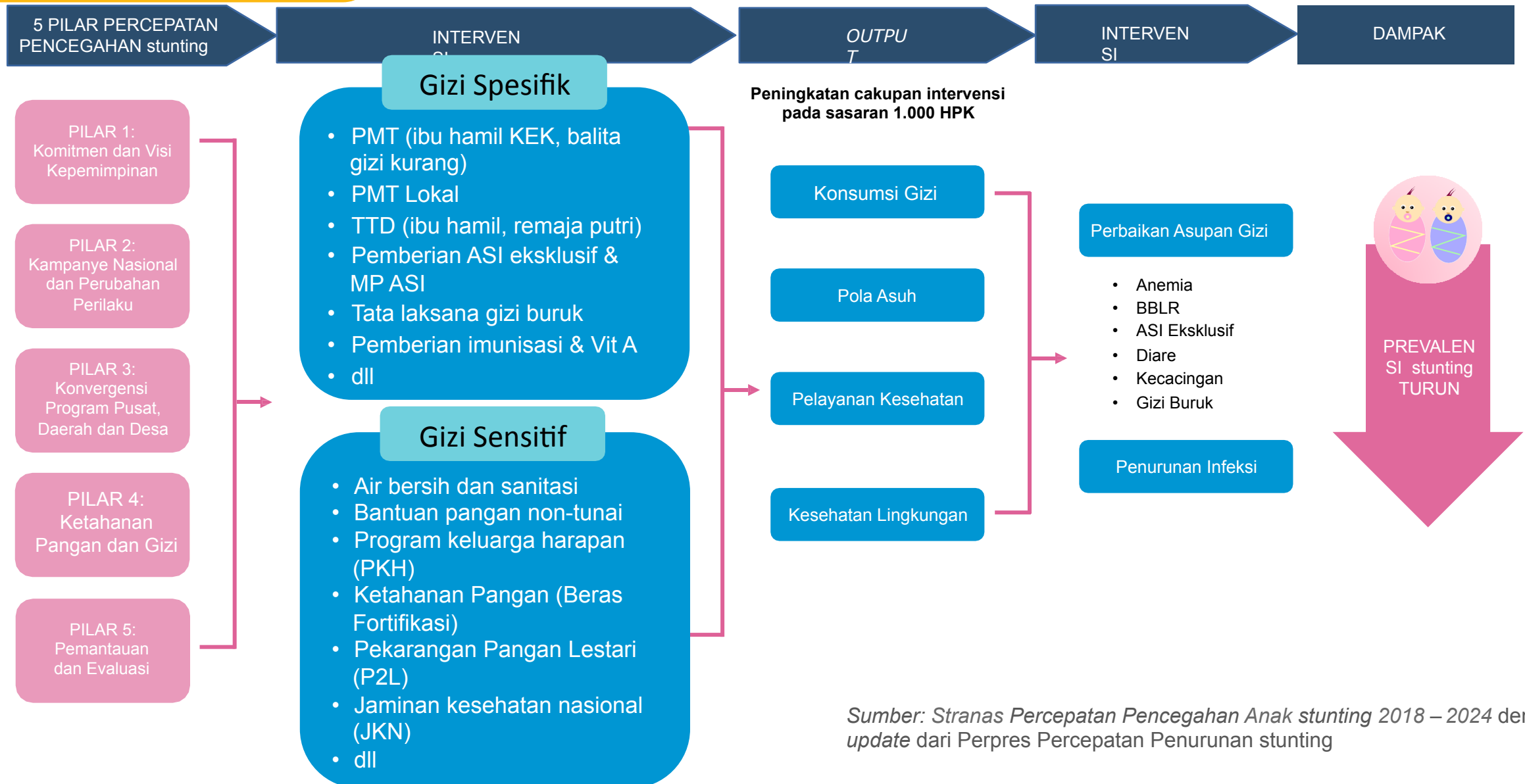
Kerangka Pikir Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi



- Penyebab *stunting* sangat kompleks baik langsung maupun tidak langsung
- Memerlukan **intervensi lintas sektor**: spesifik dan sensitif
- Setiap intervensi memiliki kontribusi dalam percepatan penurunan *stunting*



Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi





Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Stranas Percepatan penurunan Stunting 2018-2024

- **5 Pilar fokus** pencegahan stunting
- Intervensi gizi **spesifik dan sensitif** pada **sasaran prioritas** (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 HPK)
- Target output: Perbaikan konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan
- Tahun 2021 fokus di 360 kab/kota

RPJMN 2020-2024

- Major Project: Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
- Manfaat proyek: meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan:
 1. Menurunnya **angka kematian Ibu** hingga **183 per 100.000 kelahiran hidup (KH)**
 2. Menurunnya prevalensi **stunting** pada balita hingga **14 persen**

Kelembagaan Tim Nasional Percepatan Penurunan Stunting

- **Tujuan:** Melembagakan struktur organisasi tim percepatan penanganan stunting, yang saat ini belum struktur yang resmi dilembagakan
- Terdiri dari Pengarah, Pelaksana (Ketua, Koordinator, Anggota), Kelompok Kerja, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kab/Kota
- Pengaturan tata kelola koordinasi antara K/L, lintas sektor, dan lintas program (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi)

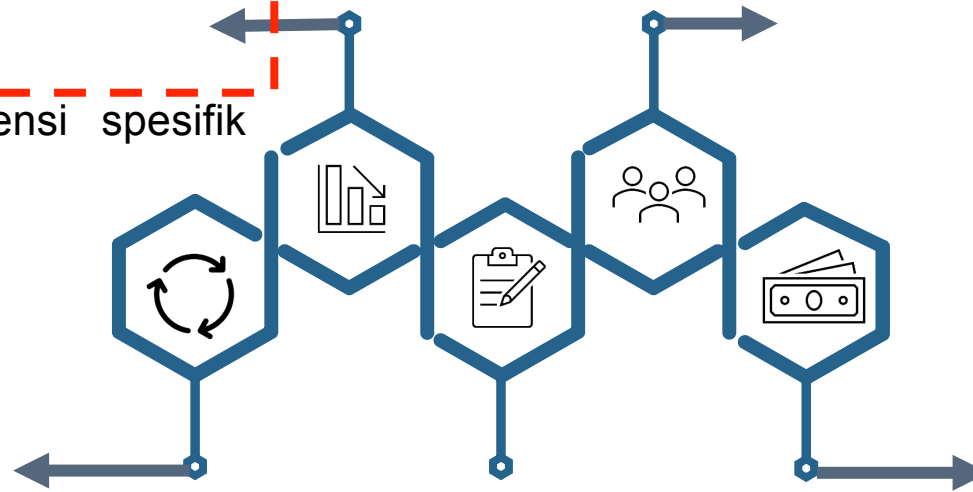
Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

- Pelembagaan Stranas Stunting → Dasar hukum/Mandat Legal terkait pembagian tugas, peran dan mekanisme pengkoordinasian dan konvergensi implementasi Stranas Stunting
- Penugasan BKKBN sebagai koordinator lapangan pelaksanaan dan konvergensi intervensi stunting



Penajaman Kegiatan dan Sasaran

- Diarahkan kepada keluarga 1.000 HPK (ibu hamil dan balita).
- Integrasi data sasaran.
- Perluasan cakupan intervensi spesifik minimal 90%



Penguatan Data, Perencanaan Pemantauan & Evaluasi

- Sistem money terintegrasi.
- Penandaan (*tagging*) anggaran K/L, APBD, dan dana desa.
- Penilaian kinerja K/L.

Pembiayaan

- Pembiayaan melalui anggaran K/L dan DAK *stunting*
- Penganggaran APBD dan dana desa.
- Insentif untuk daerah yang berhasil
- Pelibatan *SUN Networks* (Dunia usaha, organisasi masy, PT dan organisasi profesi) di tingkat provinsi.



MAJOR PROJECT 2022:



Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional



Penurunan Kematian Ibu dan
Stunting



Peningkatan kesehatan
ibu, anak, KB, dan
kesehatan reproduksi



Percepatan perbaikan
gizi masyarakat



Peningkatan
pengendalian
penyakit



Pembudayaan
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
(Germas)



Penguatan
sistem kesehatan &
pengawasan
obat dan makanan

PROGRAM PRIORITAS:

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

“ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan **sistem kesehatan** dan **health security**, termasuk jaminan terhadap akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi ”



- Pada tahun **2022**, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting untuk mencapai **target prevalensi stunting sebesar 18,4 persen**.
- **Arah kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2022:**
 - 1) Penajaman sasaran prioritas** (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan, atau disebut rumah tangga dengan 1.000 HPK) dan sasaran penting (anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur, remaja putri, dan calon pengantin);
 - 2) Perluasan lokus prioritas** hingga seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 kabupaten/ kota);
 - 3) Penguatan regulasi kelembagaan** stunting melalui Perpres Percepatan Penurunan Stunting;
 - 4) Penguatan implementasi konvergensi program di lapangan** melalui penguatan peran BKKBN sebagai koordinator pelaksana/lapangan hingga ke level desa dan rumah tangga prioritas; dan
 - 5) Penajaman intervensi gizi spesifik dan sensitif**
- Kebijakan tersebut juga **diperkuat** dengan dukungan terhadap penyediaan **basis data terintegrasi**.
- Dukungan TKDD untuk mendukung pencegahan stunting pada tahun 2022 yaitu dengan melanjutkan kebijakan di tahun 2021 melalui alokasi DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa.



Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting 2018 – 2024

LOKASI FOKUS STUNTING

- Lokasi fokus sebagai **acuan** bagi **K/L** dan **pemangku kepentingan** dalam **memprioritaskan lokasi pelaksanaan program/kegiatannya**.
- **Kriteria pemilihan lokasi fokus:**
 1. Jumlah balita *stunting*
 2. Prevalensi *stunting*
 3. Tingkat kemiskinan
 4. Daerah dengan komitmen & praktik baik
 5. Pemerataan lokus di tiap provinsi

Untuk mempercepat penurunan *stunting*, mulai **tahun 2022** seluruh kab/kota akan menjadi lokus percepatan penurunan *stunting*

SEBARAN LOKUS STUNTING 2018 - 2021

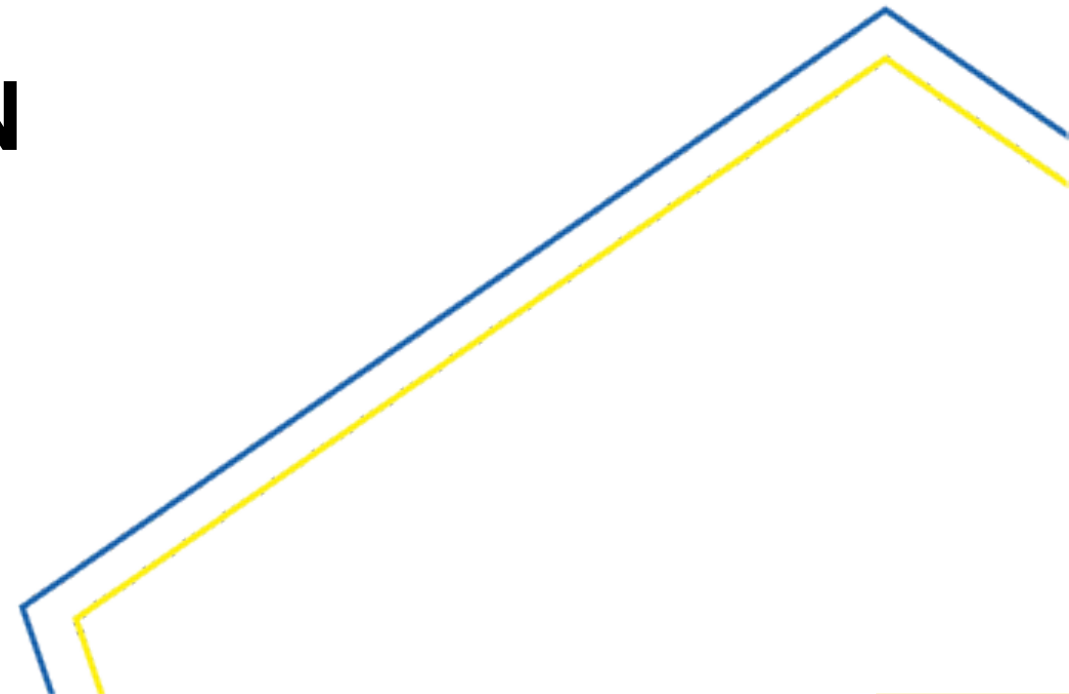


2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100	160	260	360	514	514	514
kab/kota	kab/kota	kab/kota	kab/kota	kab/kota	kab/kota	kab/kota



3

DUKUNGAN APBN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING





Pemerintah telah memberikan dukungan pendanaan untuk pencegahan stunting, baik melalui mekanisme Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TA 2020

- Pada tahun 2020, belanja APBN untuk K/L dialokasikan terutama untuk 20 K/L yang bertanggung jawab.
- **Belanja K/L pada APBN 2020** mengalami kenaikan, yang semula dianggarkan **Rp27,5 T** meningkat menjadi **Rp39,8 T**, dengan rincian sebesar Rp1,4 T untuk intervensi spesifik, Rp37,9 T untuk intervensi sensitif, dan Rp0,5 T untuk dukungan dan koordinasi
- **Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020** dilakukan dengan mengalokasikan **(1) DAK Fisik sebesar Rp1,9 T** untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi; **(2) DAK Non Fisik sebesar Rp2,7 T** untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

TA 2021

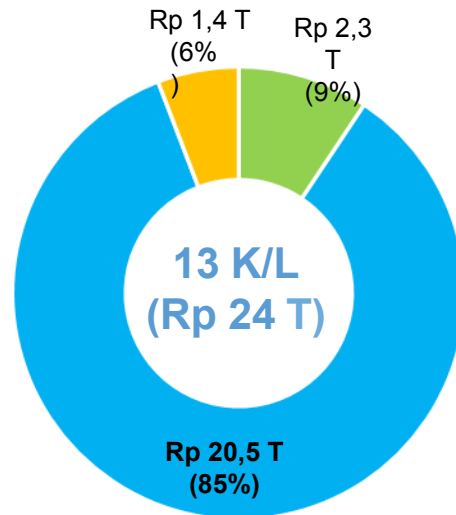
- Pada tahun 2021, belanja APBN untuk K/L dialokasikan terutama untuk 19 K/L yang bertanggung jawab.
- **Belanja K/L 2021, mengalami kenaikan dari semula Rp32,98 T menjadi Rp35,3 T**, dengan rincian sebesar Rp2,4 T untuk intervensi spesifik, Rp32,5 T untuk intervensi sensitif, dan Rp0,4 T untuk dukungan dan koordinasi
- **Untuk TKDD, selain penambahan alokasi anggaran DAK Fisik menjadi sebesar Rp7,35 T**, dukungan pencegahan stunting semakin diperluas dengan menambah Bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik. **Anggaran DAK Non Fisik** dialokasikan sebesar **Rp 4,1 T** dan ada penambahan Jenis Ketahanan Pangan serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk DAK Non Fisik sebagai dukungan pencegahan stunting



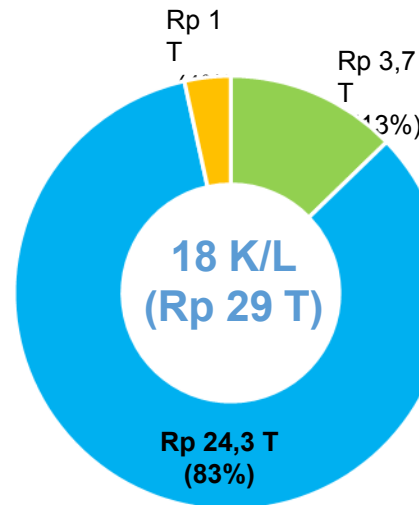
Anggaran yang Mendukung Penurunan Stunting Bersumber Belanja K/L

Secara umum, alokasi anggaran KL yang mendukung penurunan *stunting* terus meningkat

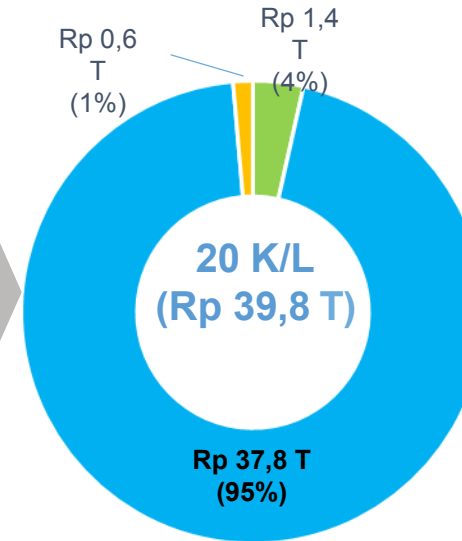
TA 2018



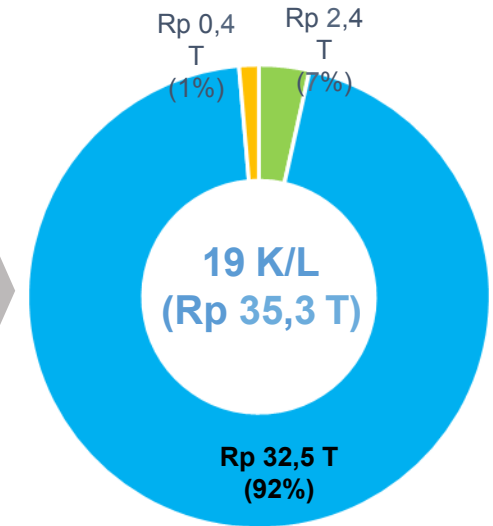
TA 2019



TA 2020



TA 2021



- Salah satu upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting adalah menyediakan alokasi pendanaan yang cukup pada berbagai intervensi.
- Secara umum dari tahun ke tahun alokasi anggaran intervensi gizi sensitif lebih besar daripada intervensi lainnya. Pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran intervensi gizi sensitif menyumbang **92%** dari total anggaran penurunan stunting
- Besarnya anggaran ini umumnya disumbang oleh program yang bersifat bantuan sosial kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta

Intervensi Gizi Sensitif dengan Alokasi Anggaran Terbesar

- Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat /PKH (Kemensos)
- KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan SEMBAKO wilayah I, II dan III (Kemensos)
- Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (Kemenkes)

- Intervensi Gizi Spesifik
- Intervensi Gizi Sensitif
- Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis

Sumber: Data Renja KL 2018 serta
DIPA 2019, APBN-P 2020 dan
RKA-KL 2021



Anggaran yang Mendukung Penurunan Stunting Bersumber Belanja K/L Tahun 2021



Jumlah K/L

19 K/L

- 6 K/L kunci
- 5 K/L koordinasi/dukungan
- 8 K/L penajaman intervensi



Alokasi
Anggaran

Rp 35,3 Triliun



Jumlah RO (rincian *output*)

220 RO (Kegiatan)

5 (lima) RO yang mendukung penurunan stunting dengan alokasi terbesar:

- QEB.201-Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat sebesar Rp9,24 triliun pada Kemensos
- QEB.101-KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sebesar Rp7,18 triliun pada Kemensos
- QEB.102-KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II sebesar Rp6,07 triliun pada Kemensos
- QEB.103-KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebesar Rp4,74 triliun pada Kemensos
- QEA.001-Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS sebesar Rp4,09 triliun pada Kemenkes



Anggaran yang Mendukung Penurunan Stunting melalui TKDD

- ❑ Dukungan pendanaan untuk penurunan stunting yang diberikan melalui TKDD telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD antara lain DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, dan Dana Desa dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan **PMK Nomor 61/PMK.07/2019** tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
- ❑ **Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020** dilakukan dengan mengalokasikan **DAK Fisik sebesar Rp1,9 T dengan realisasi senilai Rp1,8 T** untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi. Untuk **DAK Non Fisik sebesar Rp2.7 Triliun** dan memiliki realisasi dengan nilai yang sama untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- ❑ **Anggaran DAK Non Fisik dialokasikan sebesar Rp 4.1 T** dan ada **penambahan Jenis Ketahanan Pangan serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk DAK Non Fisik** sebagai dukungan pencegahan *stunting*.
- ❑ Adapun, **dukungan Dana Insentif Daerah (DID) dalam pencegahan *stunting* dilakukan sejak 2018 dengan memasukkan variabel *stunting* dalam perhitungan pemberian DID**. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah **telah mengalokasikan DID untuk kategori *stunting* sebesar Rp3,84 Triliun**.
- ❑ **Untuk tahun anggaran 2022, DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp8,98 Triliun** untuk mendukung percepatan penurunan stunting yang terdiri dari Bidang Kesehatan dan KB senilai Rp3,98 Triliun, Bidang Air Minum senilai Rp3 Triliun, dan Bidang Sanitasi senilai Rp2 Triliun **dengan perluasan cakupan lokasi prioritas dari 360 daerah menjadi seluruh daerah di Indonesia untuk tahun 2022**. Berikut juga untuk **DAK Nonfisik 2022 dialokasikan sebesar Rp1,8 Triliun** yang terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting, Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).



Kinerja Capaian Beberapa Output Kunci yang Mendukung Penurunan Stunting TA 2020

Beberapa Output Pilihan, berdasarkan data kuantitatif, menunjukkan kinerja cukup baik pada Kabupaten/Kota Prioritas. **Namun hasil ini belum dapat dibandingkan dengan data Populasi target yang seharusnya.**

Intervensi Gizi Spesifik (Kemenkes)



89.565

Ibu Hamil KEK Mendapatkan PMT pada 45 Kabupaten/Kota Prioritas



196.280

Balita Kurus Mendapatkan PMT pada 55 Kabupaten/Kota Prioritas



89.840

Balita Gizi Kurang Mendapatkan Suplementasi Gizi (Taburia) pada 40 Kabupaten/Kota Prioritas



2.330.996

Jumlah Bayi (0-11 bulan) yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap pada 260 Kabupaten/Kota Prioritas

Intervensi Gizi Sensitif



28.922

Ton Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dihasilkan di 19 Kabupaten/Kota Prioritas (Kementan)



2.400

Lembaga PAUD telah menyelenggarakan Pendidikan Holistik Integratif di 24 Kabupaten/Kota Prioritas (Kemendikbud)



3.931.186

Keluarga yang memiliki Baduta di 260 Kabupaten/Kota Prioritas telah terpapar materi KIE pentingnya 1000 HPK (BKKBN)



781

Lokasi pada 101 Kabupaten/Kota Prioritas telah membentuk Kawasan Rumah Pangan Lestari (Kementan)



100.879

Orang yang berdomisili di 199 Kabupaten/Kota Prioritas telah mengikuti Bimbingan Pra-Nikah Calon Pengantin (Kemenag)



1.937.087

Keluarga Miskin pada 260 Kabupaten/Kota Prioritas telah mendapat Bantuan Tunai Bersyarat (Kemensos)



13.177.458

KPM pada 260 Kabupaten/Kota Prioritas telah mendapat Bantuan BNPT/SEMBAKO (Kemensos)

Koordinasi, Pendampingan, Dukungan Teknis



6.849

Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat pada 193 Kabupaten/Kota Prioritas telah ditingkatkan kemampuan P2K2 (Kemensos)



1.893

Guru dan Tenaga Pendidik pada 96 Kabupaten/Kota Prioritas telah mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan Stunting (Kemendikbud)



242

Provinsi/Kabupaten/Kota Prioritas telah dibina dalam Konvergensi Program Penanganan Penurunan Pelayanan Stunting (Kemdagri)



4

PERAN SELURUH PIHAK DALAM MENGATASI STUNTING



Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Mendukung Penurunan Stunting (1)

- ❖ Manusia adalah aset yang sangat penting bagi suatu negara dan **persoalan *stunting* bukan persoalan ibu dari anak-anak itu sendiri namun merupakan persoalan multidimensi**, oleh karena itu Pemerintah harus saling sinergi dan bekerjasama baik dengan K/L maupun Pemerintah Daerah. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang membuat tantangan ini makin besar dimana anak-anak semakin mengalami keterpurukan dari sisi kekurangan gizi.
- ❖ Pelaksanaan upaya penurunan *stunting* di daerah masih mengalami **beberapa kendala dan tantangan**. Salah satu tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah **kurangnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya pemahaman daerah dan desa atas program-program penanggulangan *stunting***.
- ❖ Untuk itu, **peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk terus mendorong program *stunting* sebagai prioritas utama**, dan kepada **Gubernur/Walikota/Bupati agar dapat memberikan arahan kepada seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah** untuk memahami, mengenali, dan berkomitmen untuk menangani *stunting* ini.
- ❖ Selain itu juga perlu **dilakukan review penggunaan anggaran *stunting*** baik yang melalui anggaran KL, TKDD: DAK, DID dan Dana Desa serta **memperhatikan kewajiban pelaporan dan syarat penyaluran**. Dan **mendorong daerah dalam rangka pemanfaatan anggaran *stunting* lebih efektif**.
- ❖ **Komitmen dan sinkronisasi di daerah juga harus tercermin dalam pendanaan APBD**. Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun TKDD. Dengan demikian, berbagai sumber dana tersebut dapat memberikan hasil yang paling optimal dalam upaya penurunan *stunting*.



Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Mendukung Penurunan Stunting (2)

- ❖ **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting** ditetapkan dalam rangka mewujudkan percepatan pelaksanaan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. **BKKBN memiliki peran dan tugas yang sangat penting sebagai koordinator** dalam mensinergikan, memastikan konvergensi dan melakukan pemantauan pelaksanaan intervensi stunting di tingkat lapangan.
- ❖ **Langkah-langkah dan tindakan, program serta kebijakan yang diperlukan dalam menangani *stunting* harus jelas, terpenting juga untuk mendapatkan data yang akurat** yang diharapkan dapat *men-tracking* dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menysasar ibu hamil, dan para balita **sehingga mereka bisa menjadi target penerima program dan bisa mendapatkan manfaat maksimal.**
- ❖ **Peran sektor swasta, akademisi, masyarakat dan media, juga sangat penting** tidak hanya untuk memberikan informasi namun untuk edukasi dan memberikan motivasi. Bukan hanya untuk **menyelamatkan anak-anak yang akan menjadi pemegang obor estafet bagi pembangunan Indonesia ke depan**, namun mereka adalah generasi yang akan menghadapi tantangan ke depan yang semakin pelik. Oleh karena itu, saat ini seluruh komponen bangsa harus bersinergi, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menyelamatkan generasi muda kita dari *stunting*



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih
